

## **Saatnya Aceh Focus Infrastruktur Produksi**



Prof. Dr. Apridar, S.E, M.Si, Guru Besar Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan dan Kelautan Universitas Malikussaleh. Foto: Ist





















**UNIMALNEWS** -Infrastruktur produksi merupakan kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan dasar fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik (wikipedia).

Agar pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan baik, maka tahapan pembangunan harus dimulai dengan memperkuat fondasi dasar infrastruktur produksi. Fondasi ini tentu akan mampu menekan biaya produksi secara signifikan dan meningkatkan daya saing masyarakat.

Aceh menerima alokasi transfer ke daerah dan dana desa tahun 2020 berjumlah Rp 37,1 triliun. Anggaran yang begitu besar, apabila tidak diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur produksi khususnya, maka kemungkinan Aceh bisa keluar dari pusaran garis kemiskinan akan jauh panggang dari api. Begitu juga, jangan sampai Aceh terbuai oleh kenikmatan kucuran anggaran yang begitu besar hanya untuk peningkatan kesejahteraan aparatur sehingga lupa dalam menciptakan program produktif yang berkesinambungan untuk membiayai berbagai kebutuhan operasional publik kedepan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta agar pemerintah daerah mengelola dana yang ditransfer pemerintah dengan efisien. Pasalnya, 70 persen alokasi dana dari total APBD digunakan untuk menanggung urusan pegawai ketimbang diperuntukkan bagi masyarakat dan infrastruktur. Sri Mulyani mencatat bahwa sekitar 13,4 persen dana APBD digunakan untuk perjalanan dinas. Lalu sekitar 17,5 persennya untuk jasa kantor. Total nilainya mencapai 31 persen dari APBD. Besar belanja pegawai, sementara itu, menyentuh sekitar 36 persen.

Jika ditotal dengan pos belanja sebelumnya, Menkeu berkesimpulan, sekitar 70 persen belanja APBD hanya digunakan untuk mengurus pejabat daerah. Menurutnya, hal ini merupakan ironi karena masyarakat hanya mendapat sisa sekitar 30 persen atau sepertiganya saja. Ia mengatakan, porsi anggaran yang demikian harus diubah sehingga masyarakat mendapat manfaatnya. (<https://tirto.id/emtP>)

Pernyataan Sri Mulyani ini merupakan kondisi keprihatinan menteri keuangan terhadap efektivitas penggunaan uang negara. Pendapatan negara yang sebagian besar bersumber dari pajak masyarakat, seharusnya dikelola dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana transfer dari pusat hendaknya semuanya digunakan untuk kepentingan publik jangka panjang. Agar ketertinggalan pembangunan dapat disejajarkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, atau sebelum dana bagi hasil berakhir.

Untuk itu pengelolaan uang rakyat, tidak hanya dituntut sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan yang baik dan benar, namun harus dapat meningkatkan produktivitas sehingga adanya kesejahteraan masyarakat yang meningkat dari tahun ketahun. Peningkatan produktivitas tentu tergambar oleh adanya pertumbuhan ekonomi yang masif yang dapat menekan tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat dalam jangka panjang.

Agar pendapatan masyarakat dapat meningkat, tentu harus didukung dengan infrastruktur produksi yang mumpuni. Dengan baiknya infrastruktur produksi, tentu akan mengundang para investor untuk menanamkan modal pada berbagai sektor produksi. Bahkan sektor Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) ataupun sektor informal juga akan lebih mudah untuk menjalankan usahanya secara mandiri dengan biaya yang murah dengan baiknya infrastruktur produksi.

Sudah saatnya Aceh harus fokus untuk pembangunan ekonomi jangka panjang. Jangan terlena dengan berbagai kegiatan rutinitas dengan alasan merawat perdamaian, sehingga kucuran dana aspirasi yang tidak mendukung pada peningkatan infrastruktur dasar serta untuk meningkatkan produksi jangka panjang perlu dipertimbangkan kembali. Perkebunan sawit aceh yang begitu luas, belum didukung oleh alat pengolahan cpo yang mencukupi di berbagai daerah. Sehingga banyak sekali nilai tambah dan produksi turunan dari hasil sawit tersebut dinikmati oleh pengusaha luar. Begitu juga dengan kilang padi yang mampu mengolah beras dengan kualitas tinggi belum dimiliki oleh pengusaha Aceh di setiap daerah kabupaten kota. Sehingga banyak sekali gabah yang diangkut keluar untuk diproses kemudian dijual kembali ke Aceh dengan demikian nilai tambah lebih banyak dinikmati para pengusaha luar

**Tanggal:** 07 January 2020

**Post by:** [Tami](#)

**Kategori:** [News](#), [Repository Media](#), [Artikel Opini](#),

**Tags:** [Aceh](#),